

Perbandingan perilaku Kekuasaan beberapa Presiden Paska Soeharto

	Habibie	Gus Dur	Megawati	SBY
Latar Belakang	<ul style="list-style-type: none"> Bekas Menteri dizaman Soeharto selama 4 periode Wapres RI Ketua ICMI Ketua dewan Penasehat Golkar. 	<ul style="list-style-type: none"> Pemimpin kharismatik NU Mendirikan PKB Tokoh Pluralisme, Kemanusiaan dan Demokrasi di zaman Soeharto. 	<ul style="list-style-type: none"> Ketua Umum PDI-P Korban 27 Juli 1997 Anak Pemimpin kharismatik/Presiden RI I Soekarno 	<ul style="list-style-type: none"> Kaster TNI zaman Soeharto dan Habibie Menkopolkam zaman Gus Dur (mengundurkan diri) Mantan Menkopolkam zaman Megawati (mengundurkan diri)
Konteks Politik	Reformasi 1998	Pemilu Multi Partai	Skandal Politik Presiden Versus Parlemen.	Pemilu Langsung Pertama
Dukungan Politik	Warisan konstitusional era Orde Baru	Pemilu Pasca Soeharto pertama & didukung oleh Koalisi Parpol Minoritas/Islam	Keputusan Sidang Istimewa	Pemilu Presiden Langsung (60% suara)
Kebijakan politik	<p>(+)</p> <ul style="list-style-type: none"> Masuknya agenda HAM secara khusus dalam tata kenegaraan (TAP MPR No. XVII/MPR/1998), RAN HAM 1999-2003, TAP MPR No. IV/MPR/1999) Kebebasan Pers (pencabutan SIUPP) Referendum Timor-timur Ratifikasi CAT dan CEARD Penarikan Pasukan dari Aceh Pembebasan Tapol/Napol Pencabutan UU Subversif UU Otonomi Daerah <p>(-)</p> <ul style="list-style-type: none"> Keluarnya UU 45/1999 (Pemekaran Papua) 	<p>(+)</p> <ul style="list-style-type: none"> Masuknya agenda HAM dlm amandemen UUD 45, Bab X A UU No. 39/1999 tentang HAM Perpu 1 th 2000 tentang Pengadilan HAM Pengadilan HAM (UU 26/2000) KPP HAM Tim-tim Jeda Kemanusiaan Pembebasan Tapol/Napol UU 21/2001 Otsus Papua. <p>(-)</p> <ul style="list-style-type: none"> Darurat Sipil di Ambon 	<p>(+)</p> <ul style="list-style-type: none"> Pilkada Pemilihan Presiden Langsung Perubahan Susduk MPR Pengakuan Hak dipilih mantan '65 dalam Pemilu CoHA (RI dgn GAM) RAN HAM 2004-2009 UU No. 10/2004 tentang Tata Cara Pembuatan UU <p>(-)</p> <ul style="list-style-type: none"> Darurat Militer dan Darurat Sipil Aceh Inpres no 1/2003 pemekaran Wilayah. UU 18/2001 NAD Perpu Terorisme nomor 1 dan 2 	<p>(+)</p> <ul style="list-style-type: none"> MRP Perundingan damai pemerintah RI-GAM di Helsinki Pembentukan TPF Kasus Munir <p>(-)</p> <ul style="list-style-type: none"> Memperpanjang Darurat Sipil di Aceh

			<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan Hukuman Mati • Pembentukan UU KRR • Pemberhentian CoHA • Operasi Intelijen di Poso • UU No. 34/2004 tentang TNI • UU.No. 27/2004 tentang KKR 	
Pembenahan Institusional	Multi Partai	<p>(+)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemisahan TNI & Polri • Independensi Komnas HAM • Kementerian HAM <p>(-)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penambahan KODAM di Ambon • Pelarangan militer aktif duduk di jabatan politik sipil negara. • Penghapusan jatah posisi militer di parlemen (untuk agenda 2004) 	<p>(+)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mahkamah Konstitusi <p>(-)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penambahan KODAM Aceh • Mengizinkan lagi militer aktif duduk di jabatan sipil negara. 	<p>(+)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan MRP • Kecharusan untuk membatasi/menghapus bisnis militer sesuai UU No. 34/2004 • Pembentukan Komisi Yudisial <p>(-)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Posisi politik Wapres yang cukup tinggi. • Pembentukan Komisi Kebenaran dan Persahabatan antara RI-Timor Leste. • Pembentukan Bakorinda
Pelanggaran HAM Signifikan	<ul style="list-style-type: none"> • Pel. HAM di Timor-timur • Pembantaian pesantren Tengku Bantaqiyah • Peristiwa Simpang KKA • Kerusuhan Ambon • Kerusuhan Sampit • Kerusuhan Poso • Semanggi I • Semanggi II • Pembunuhan berantai Dukun Santet 	<ul style="list-style-type: none"> • Kerusuhan Ambon • Kerusuhan Sampit • Kerusuhan Poso • BOM Natal 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembunuhan Theys Eluays • Kekerasan Aceh berlanjut • Kekerasan di Poso berlanjut • Kekerasan di Maluku berlanjut • Peristiwa Umi Makasar • Peristiwa Bulukumba • Kekerasan & Kriminalisasi Media, petani, buruh dan HRD • Kriminalisasi Aksi/demonstrasi • Penyerangan KontraS dan entitas HRD lainnya. • Pembunuhan Munir 	<ul style="list-style-type: none"> • Kasus TPST Bojong • Kasus Puncak Jaya • Kasus Peledakkan dan Penembakan Misterius Bom di Poso dan Palu

Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengadilan koneksitas Kasus Teungku Bantaqiah ▪ Pengadilan Militer Kasus Trisakti 	Pengadilan HAM ad hoc Kasus Timor Timur	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengadilan Militer Kasus Theys Eluay ▪ Pengadilan Koneksitas Kasus 27 Juli 1996 ▪ Pengadilan HAM ad hoc Kasus Tanjung Priok yg salah satu putusannya adl memberikan kompensasi kepada korban ▪ Mulai digelar nya Pengadilan HAM Kasus Aberpura ▪ Putusan banding dan kasasi Pengadilan HAM ad hoc Kasus Timor Timur ▪ Pengadilan militer untuk kasus Semanggi II 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Banding Pengadilan HAM ad hoc Kasus Tanjung Priok ▪ Belum diterimanya kompensasi bagi korban Kasus Tanjung Priok ▪ Lanjutan Pengadilan HAM Kasus Aberpura ▪ Masih macetnya berbagai kasus pelanggaran HAM masa lalu yang dibawa ke pengadilan; TSS, Mei 1998, Wamena dan Wasior.
LPJ Politik	Laporan Pertanggung jawaban ditolak oleh MPR terpilih hasil Pemilu 1999	Diturunkan melalui Sidang Istimewa MPR	Kalah dalam Pemilu putaran kedua dari SBY	

Dokumentasi KontraS : Diolah dari berbagai sumber